

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pertanggungjawaban yang di dalamnya terkandung informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan. Selanjutnya Mamduh (2003) menyatakan manfaat dari kandungan informasi akan makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini berarti bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sangatlah penting. Apabila penyelesaian penyajian laporan pertanggungjawaban terlambat atau tidak diperoleh saat dibutuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan pertanggungjawaban untuk pengambilan keputusan akan berkurang.

Laporan keuangan disusun dalam rangka membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan sekaligus untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Berdasarkan penjelasan diatas laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk memertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, Menurut Mahsun dkk (2009) laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik; (1) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, (2) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (3) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (4) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Untuk memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, salah satu hal yang dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem akuntansi instansi (SAI). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hariadi, dkk (2010: 110) untuk menciptakan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan sebuah Sistem Akuntansi yang salah satunya dikenal dengan sistem akuntansi instansi (SAI), sistem akuntansi instansi dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang digunakan untuk pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara juga menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari sistem akuntansi pusat (SIAP) dan sistem akuntansi instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga.

Halim Dkk (2010: 10) menjelaskan sistem akuntansi instansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga (termasuk entitas pemda yang menerima dana APBN dan K/L). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sistem akuntansi instansi diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan

pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan, (Halim, dkk, 2010: 51). Lebih lanjut Halim dkk menjelaskan bahwa sistem akuntansi instansi (SAI) dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan BMN sebagai laporan penatausahaan BMN. SAI berlaku untuk seluruh unit organisasi pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonstrasi/ atau tugas pembantu serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. SAI dilaksanakan oleh kementrian/ lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari sistem akuntansi pertanggungjawaban anggaran (SAK) dan sistem akuntansi pertanggungjawaban Barang (SABMN).

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan sistem akuntansi instansi diciptakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, dalam artian sistem akuntansi instansi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi. Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan, seperti dalam penelitian Hazrita, dkk (2011) yang menunjukkan bahwa sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Selain itu penelitian dari Rahman, dkk (2012) hasil penelitiannya juga membuktikan SAI

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan dan dekonsentrasi. Selain itu penelitian dari Murungi dan Kayigamba (2015) dalam jurnal internasional *of Emerging Trends in Economics and Management Science* yang menguji tentang dampak dari system akuntansi pada pelaporan keuangan kementerian Lokal Pemerintah (MINALOC) di Rwanda. Hasil dari penelitian mereka membuktikan bahwa system akuntansi terkomputerisasi yang diterapkan pada kementerian tersebut dapat mempengaruhi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, system akuntansi memberikan kontribusi yang positif untuk pelaporan keuangan di MINALOC tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan system akuntansi (perangkat lunak) akan membantu pengelolaan Departemen memahami dan pentingnya menggunakan paket perangkat lunak akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan. dengan menggunakan software akuntansi penyusunan laporan keuangan dapat lebih mudah dan cepat.

Sama halnya dengan penelitian dari Abdallah (2013) dalam jurnal *European, Special edition Scientific Journal. 1, 41-48* yang meneliti dampak dari penggunaan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang diserahkan pada kementerian pajak di Jordan, Studi ini menemukan bahwa ada kehadiran dari dampak ketika menggunakan sistem informasi akuntansi pada kualitas laporan keuangan yang disampaikan ke Departemen Pajak dan penjualan Penghasilan di

Yordania, studi ini menyarankan untuk fokus pada pengembangan perangkat yang digunakan di departemen tersebut, melakukan pengembangan staf secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari SDM dan tentunya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di department tersebut.

Selain dengan menerapkan sistem akuntansi instansi, untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, dalam penelitian Abidin (2013) dijelaskan Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, peran SDM dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting. Penyusun laporan keuangan hendaknya memiliki Kompetensi Sumber daya manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini juga diungkapkan oleh Humairah (2013: 2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang

dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan.

Kompetensi SDM pada dasarnya merupakan sebuah refleksi dari nilai-nilai keahlian seseorang dalam melaksanakan bidang pekerjaannya. Dalam hal ini semakin kompleks perkembangan bisnis yang terjadi secara langsung akan dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam menjalankan bidang pekerjaannya. Hal ini terjadi karena munculnya nilai-nilai baru yang dibawa oleh perubahan teknologi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu karyawan akan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru tersebut untuk kemudian diintegrasikan pada kegiatan inovasi dan kreatifitas yang dapat dikembangkan pada bidang pekerjaannya, (Humairah, 2013: 14). Berdasarkan penjelasan tersebut kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan bidang pekerjaan secara tepat dan akurat, laporan keuangan yang berkualitas tentunya harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidang tersebut. Dengan adanya keterampilan, pengetahuan, pendidikan dan pelatihan tentunya akan menciptakan SDM yang memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sebagaimana didukung oleh penelitian dari Fitriah

(2013) kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh SDM akan semakin meningkatkan laporan keuangan. penelitian dari Wati dkk (2014) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh penyusunan laporan keuangan tingkat di bawahnya karena prinsip penggabungan yang dilakukan secara berjenjang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh tiap-tiap satuan kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) digabungkan oleh unit akuntansi di atasnya pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Laporan keuangan tingkat wilayah digabungkan lagi di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1). Laporan Keuangan antar tingkat Eselon I digabungkan di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) sehingga dihasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Selanjutnya tiap-tiap Kementerian/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan. Laporan tingkat Kementerian/Lembaga, menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Konsekuensi dari prinsip penggabungan secara berjenjang adalah akumulasi kesalahan jika pada level di bawahnya menyajikan data yang

tidak akurat. Oleh karena itu setiap satuan kerja yang berkewajiban memegang peran penting bagi keandalan informasi yang disajikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan KPU Tahun 2014, bahwa laporan keuangan KPU masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Adapun alasan kenapa BPK masih memberikan opini WDP atas laporan keuangan KPU, hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan terdapat SPJ yang belum lengkap karena adanya keterlambatan pemasukan SPJ dari kecamatan dan desa. Selain itu Dalam pemeriksaan laporan keuangan ini Badan Pemeriksa Keuangan RI juga melaporkan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundangan. Beberapa permasalahan ketidakpatuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah masih adanya aset Komisi Pemilihan Umum berupa kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak lain dan masih ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor komisi pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu dari banyak instansi pemerintahan yang ada di provinsi Gorontalo yang mengelola keuangan negara yang membutuhkan sistem akuntansi instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kendala yang terjadi dalam kantor komisi pemilihan umum dalam menjalankan kegiatannya salah satunya yaitu sulitnya melakukan pengawasan/pengendalian yang efektif karena instansi tersebut

kegiatannya yang semakin kompleks maka dibutuhkan laporan keuangan yang akurat.

Dari hasil wawancara dengan kepala KPU Kabupaten Bone Bolango penerapan sistem akuntansi instansi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik, namun diungkapkan oleh pegawai bagian keuangan KPU tersebut, masih ada beberapa permasalahan terkait penerapan SAI tersebut antara lain: Keterbatasan sumberdaya manusia yang belum berkompeten sehingga dapat menghambat tercapainya output atau sasaran yang diinginkan hal ini juga disebabkan Belum maksimalnya fasilitas fasilitas yang mendukung kinerja SDM dalam melakukan tugasnya seperti fasilitas internet yang belum memadai. Kendala-kendala tersebut belum memaksimalkan penerapan sistem akuntansi instansi pada KPU, yang tentunya berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem akuntansi instansi merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan adanya SDM yang berkompeten sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena SDM yang berkompeten merupakan asset penting dalam sebuah organisasi. Selain itu dengan adanya penerapan Sistem akuntansi instansi, maka kualitas laporan keuangan diharapkan akan membantu setiap permasalahan yang biasanya terjadi dan tidak ada lagi

keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan maupun kesalahan dalam pengimputan data serta akan membantu mempermudah administrator yang tidak berlatar belakang akuntansi dalam memahami dan menguasai sistem akuntansi instansi pada saat mengoperasikannya. Seperti dalam penelitian Rahman dkk, (2012) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif antara kompetensi, dan SAI terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan dana dekonsentrasi SKPA yang mengelola dana dekonsentras. Sedangkan penelitian dari Moni And Fachruzzaman (2013) hasil penelitiannya secara simultan kompetensi SDM dan implementasi SAI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun secara parsial kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan implementasi SAI mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian judul **"Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Oleh Kompetensi SDM Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan KPU berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan KPU Tahun 2014, bahwa laporan keuangan KPU masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan terdapat SPJ yang belum lengkap karena adanya keterlambatan pemasukan SPJ dari kecamatan dan desa.
2. Belum maksimalnya penerapan SAI dikarenakan Keterbatasan sumberdaya manusia.
3. Belum maksimalnya fasilitas-fasilitas yang mendukung kinerja SDM dalam melakukan tugasnya seperti fasilitas internet yang belum memadai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi instansi, Kompetensi SDM berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango?.

2. Apakah Kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi instansi, kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai sistem akuntansi instansi dan kualitas laporan keuangan. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak lain yang akan tertarik akan masalah yang ada di angkat untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi KPU Bone Bolango.